

ABSTRAK

PERAN BAPUSIPDA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

(Studi Deskriptif pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat)

**Muhamad Arbi Sulasmansyah
(1202322)**

Kebijakan adalah suatu norma yang diakui oleh masyarakat khususnya bagi suatu wilayah tertentu yang berkaitan. Kebijakan sangat perlu dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Begitu juga kebijakan yang terkait dengan perpustakaan khususnya tentang koleksi langka (deposit) yang sudah terbentuk sejak tahun 1990, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. pelaksanaan UU ini berlaku hanya di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilihat dari beberapa rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu dari keberhasilan, upaya, hambatan serta dampaknya bagi Bapusipda. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapusipda Provinsi Jawa Barat Bidang Perpustakaan Deposit sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner, observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan, bahwa Bapusipda telah melaksanakan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 dengan baik, proses penerimaan koleksi deposit sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, upaya yang dilakukan adalah seslalu mengingatkan pihak wajib serah simpan dan sosialisasi UU, hambatan yang dialami diantaranya kurangnya tenaga kerja dan kurangnya kesadaran pihak wajib serah simpan, meski demikian, Bapusipda dapat mengatasinya dengan baik serta program yang telah dirancang tetap terlaksana.

Kata Kunci: Koleksi Deposit, Karya Cetak, Karya Rekam.

ABSTRACT

ROLE OF THE BAPUSIPDA OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 4 YEAR 1990 ON MANDATORY DEPOSIT OF PRINTED AND RECORDED WORKS
(An Descriptive Study on the Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat)

Muhamad Arbi Sulasmansyah
(1202322)

Policy is defined as a norm that people accept, especially for certain regions. The policy should be implemented in order to achieve the established goals. As well as the policy that relates to library, particularly about scarce collection (deposit) that has been formed since 1990, it is law no. 4 of the 1990 with the content is giving and keeping the printed and recorded documents. The implementation of such law only prevails on the local library and all Indonesian's regions library. The present study discusses how the implementation of law no. 4 of the 1990 about giving and keeping the printed and recorded documents on the Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, which is evaluated based on some research problems and has been determined based on achievements, efforts, obstacles, and the impact on Bapusipda. The present study is descriptive of study that uses quantitative method. The subject of the study is Bapusipda (the institution of library and archives in west java) on the sector of deposit library and it is used as source of data. The data are collected by using questionnaire, observation, students' documentation and interviews. The result of analysis shows that Bapusipda has rightfully implemented the law No. 4 of the 1990. The process of accepting the deposit collection is done by following the established mechanism. The efforts are done by reminding the staffs who has responsibility on giving, keeping and socialization of the law. The obstacles which are faced, including the lack of staffs and the awareness the staff should have. However, Bapusipda can resolve such obstacles sand the established program is still organized.

Key words: Deposit Collection, Printed Documents, Recorded Documents.